

**KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENINGKATKAN  
KEAMANAN KESEHATAN MELALUI KERJA SAMA DENGAN  
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK TAHUN 2017-2021**

**Oleh: Mey Siregar**

*E-mail: mey.siregar0797@student.unri.ac.id*

**Pembimbing: Ahmad Fuadi, S. IP, M. Si**

*E-mail: ahmad.fuadi@lecturer.unri.ac.id*

**Bibliografi: 28 Jurnal, 28 Buku, 33 Laporan Resmi, 28 Situs Web**

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H. R. Subrantas KM 12,5 Simp. Baru – Pekanbaru 28293

Telp./Fax. 0761-63277

**ABSTRACT**

*This research analyzes the foreign policy of the Republic of Indonesia in an effort to improve its health security through cooperation in the health sector with the People's Republic of China with research limitations 2017-2021. Indonesia is a country in Southeast Asia that still has a high level of production capacity for health services, such as: raw materials for medicines, medical devices, and vaccines that are not sufficient for national needs.*

*This research uses qualitative methods with descriptive analysis type of research. The data collection uses qualitative data collection techniques, with the types of primary data collection and secondary data collection. Meanwhile, this research uses state level analysis to understand the actions and roles of the state in determining foreign policy.*

*This research finds that during Joko Widodo's reign, Indonesia has a policy of foreign cooperation in the health sector which is regulated in Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 64 Tahun 2015. The manifestation of this policy is the cooperation in the health sector between Indonesia and China in 2017. Through principle of free-active foreign policy with inward-looking attribute, Indonesia seeks to maintain a dynamic balance in the Southeast Asian region, and avoids the perception of the tendency to side with the power from China or from Western countries in the international political constellation. Through cooperation in the health sector with China, Indonesia manages to meet the percentage of the availability of medicines, medical devices, and vaccines of 60% originating from China as a reverberations to the cooperation between the two countries in the health sector.*

**Keywords:** *Foreign Policy, Health Security, Inward-looking.*

## PENDAHULUAN

Merujuk terhadap data Indeks Kesejahteraan tahun 2017 yang disajikan oleh *The Legatum Institute*, Indonesia dalam indeks kesehatan masih menempati posisi ke-101 dari 149 negara di dunia. Sedangkan negara-negara tetangganya di kawasan Asia Tenggara, seperti Singapura berada di posisi ke-2, Malaysia di posisi ke-38, Thailand di posisi ke-35, dan Vietnam di posisi ke-69 pada indeks kesehatan dunia.<sup>1</sup> Penentuan posisi pada indeks kesehatan ini ditentukan oleh kategori kesehatan fisik, mental, infrastruktur kesehatan dan perawatan untuk pencegahan berbagai wabah dan penyakit.<sup>2</sup>

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh BAPPENAS pada tahun 2019, jumlah pemenuhan vaksin dan obat-obatan di setiap puskesmas di Indonesia masih di bawah 90%.<sup>3</sup> Masalah disparitas dalam pemenuhan fasilitas obat-obatan dan vaksin juga di setiap provinsi di Indonesia dan disusul dengan disparitas ketersediaan vaksin di antara fasilitas kesehatan swasta dan fasilitas kesehatan.<sup>4</sup>

Keamanan kesehatan Indonesia semakin mengalami keterpurukan

pada Desember 2019 lalu, di mana ditemukan kasus pertama dan kasus lain akibat penularan Virus Corona di Wuhan, Tiongkok. Meskipun Tiongkok menerapkan kebijakan *lockdown* (penutupan akses) pada 23 Januari 2020 lalu, virus ini dengan cepat telah menjangkit banyak masyarakat dan bahkan telah masuk ke berbagai negara.

Berdasarkan data jumlah kasus positif COVID-19 tertinggi di dunia yang dikeluarkan oleh *Worldmeter* pada Januari 2021, Indonesia berada di posisi ke-19 di dunia. Sedangkan, menurut data jumlah kematian tertinggi akibat COVID-19 sejak Minggu ke-II pada Maret 2020 sampai 26 Juli 2021 yang disajikan oleh *Worldmeter*, Indonesia berada di posisi ke-3 di Asia dengan jumlah kasus kematian sampai menembus angka 84.766 kasus.<sup>5</sup>

Indonesia dalam rangka mencapai kepentingan di bidang keamanan kesehatan, telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) terkait kerja sama di bidang kesehatan dengan Tiongkok pada tahun 2017.<sup>6</sup>

Terkait dengan cakupan kerja sama yang tercantum di dalam MoU tersebut, terdapat poin-poin yang menekankan kedua negara untuk berkewajiban meningkatkan kerja sama, seperti pencegahan dan

---

<sup>1</sup> Legatum Institute, *The Legatum Prosperity Index 2017*, (London: Legatum Institute, 2017), hlm. 10.

<sup>2</sup> "Indeks Kesehatan Indonesia Masih Sangat Rendah", Yantina Debora, Tirto, 2017, diakses 5 September, 2021, <https://tirto.id/indeks-kesehatan-indonesia-masih-sangat-rendah-cBRn>.

<sup>3</sup> Kementerian PPN/BAPPENAS Republik Indonesia, *Penyediaan Obat Vaksin dan Alat Kesehatan*, (Jakarta: Direktorat Kesehatan Gizi dan Masyarakat, 2019), hlm. 66.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

---

<sup>5</sup> "Indonesia Covid", Worldmeter, 2021, diakses 4 September, 2021, <https://www.worldometers.info/coronavirus/country/indonesia/>.

<sup>6</sup> Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Komisi Kesehatan Nasional dan Keluarga Berencana Republik Rakyat Tiongkok di Bidang Kerja Sama Kesehatan Tahun 2017-2024, Pasal I Tujuan, hlm. 2.

pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan primer dan Jaminan Kesehatan Semesta, serta area kerja sama lain yang disepakati secara tertulis oleh para pihak.<sup>7</sup>

## KERANGKA TEORI

### Perspektif Konstruktivisme

Penelitian ini menggunakan salah satu perspektif dalam Ilmu Hubungan Internasional, yaitu Konstruktivisme dari Alexander Wendt. Wendt menyebutkan bahwa Konstruktivisme merupakan suatu perspektif yang menggagas bahwa negara adalah unit analisis prinsip dalam teori politik internasional.<sup>8</sup>

Konstruktivisme berpandangan bahwa identitas dan norma dapat memengaruhi kebijakan luar negeri. Aktor internasional akan bertindak berdasarkan identifikasinya terhadap keberadaan aktor-aktor lain, dan tanggapan mereka terkait dengan asas interaksi yang berlaku dalam lingkungan tertentu. Hasil yang didapatkan dari pengaruh identitas dan norma ini adalah persepsi setiap aktor yang berbeda-beda mengenai dengan situasi eksternalnya.<sup>9</sup>

### Teori Kebijakan Luar Negeri Model Adaptif (*The Adaptive Model*)

Menurut Rosenau, kebijakan luar negeri pada dasarnya merupakan sebuah mekanisme yang berfokus terhadap tindakan adaptasi negara dalam menanggapi perubahan yang

terjadi pada lingkungan eksternal dan internalnya, berdasarkan variabel kapabilitas dan variabel letak geografis.<sup>10</sup>

Rosenau berpandangan bahwa variabel kepemimpinan seorang kepala negara yang terkait dengan karakter dan persepsinya, juga dapat menentukan arah kebijakan luar negeri. Setiap perubahan yang terdapat dalam politik luar negeri, terjadi ketika bertambahnya tuntutan-tuntutan yang berkaitan dengan keadaan di lingkungan eksternal, akibat perkembangan yang terjadi di lingkungan internal. Bertambahnya tuntutan-tuntutan tersebut dianggap dapat berpotensi memunculkan ancaman terhadap kedaulatan negara.<sup>11</sup>

### Konsep Keamanan Kesehatan (*Health Security*)

Berdasarkan Laporan *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1994, salah satu konsep keamanan manusia adalah keamanan kesehatan.<sup>12</sup> Keamanan kesehatan merupakan keadaan ketika bidang kesehatan negara tersebut terjamin dan terbebas dari adanya berbagai ancaman kesehatan, seperti:

---

<sup>10</sup> James N. Rosenau, *The Study of Political Adaptation: Essays on The Analysis of World Politics*, (New York: Nichols Publishing, 1981), hlm. 42.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> "Human Security In Theory And Practice: Application of the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security", United Nations Trust Fund for Human Security, diakses 8 Oktober, 2021, <https://www.unocha.org/sites/dms/HSU/Publications%20and%20Products/Human%20Security%20Tools/Human%20Security%20in%20Theory%20and%20Practice%20English.pdf>

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, Pasal II Bidang Kerja Sama.

<sup>8</sup> Alexander Wendt, *Level of Analysis vs Agents and Structures*, dalam Umar Suryadi Bakry, *Dasar-dasar Hubungan Internasional*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 113.

<sup>9</sup> *Ibid.*

peningkatan penyakit menular, kurangnya akses ke perawatan kesehatan dasar dan meningkatnya kasus kekurangan gizi di negara tersebut.<sup>13</sup>

Berdasarkan laporan *United Nations Trust Fund for Human Security* (UNTFHS) dijelaskan bahwa negara harus memiliki strategi-strategi dalam menjamin akses dalam bidang pelayanan kesehatan, seperti: pencegahan berbagai penyakit yang mengancam keamanan individu, meningkatkan promosi dan infrastruktur kesehatan, gizi, dan kesiapsiagaan epidemi, pengawasan dan pengendalian penyakit, adanya peraturan untuk meminimalisir risiko anggaran dalam mempromosikan skema asuransi masyarakat, pemenuhan fasilitas air bersih dan sanitasi, perhatian khusus terhadap masyarakat menengah ke bawah yang tinggal di pedesaan, perempuan dan anak-anak.<sup>14</sup>

### **Tingkat Analisis: Negara**

Tingkat analisis menurut Rourke merupakan suatu langkah yang digunakan untuk memahami tindakan dan peran dari aktor internasional dalam menentukan kebijakan luar negeri.<sup>15</sup>

Pada tulisan ini, penulis menggunakan tingkat analisis Negara. Digunakannya tingkat analisis Negara merupakan suatu penekanan terhadap perilaku dari negara dalam menjalankan aktivitas hubungan internasional, dengan cara

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Yessi Olivia, "Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional," *Jurnal Transnasional*. Vol. 5, No. 1, (Juli 2013): 899.

mengetahui arah kebijakan atau politik luar negeri yang dijalankan negara tersebut dalam melihat suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Permasalahan Pemenuhan Pelayanan dan Kesejahteraan Kesehatan Indonesia**

Pada masa pemerintahan Joko Widodo pada tahun 2017 hingga tahun 2021, Indonesia menghadapi berbagai masalah kesehatan, seperti penyakit menular global yang dialami oleh Indonesia, dan menjadi ancaman atas keamanan kesehatan masyarakat, seperti: *Tuberkulosis*, *HIV/AIDS*, *Hepatitis*, *Campak*, *Polio*, dan *Covid-19*.

Salah satu strategi pemerintah Indonesia yang terdapat dalam RAK Kesehatan Tahun 2020-2024, yaitu meningkatkan upaya kesehatan yang bermutu, dan ketersediaan kebutuhan dasar dalam kesehatan (obat, alkes, vaksin) yang menjangkau seluruh penduduk Indonesia.<sup>16</sup>

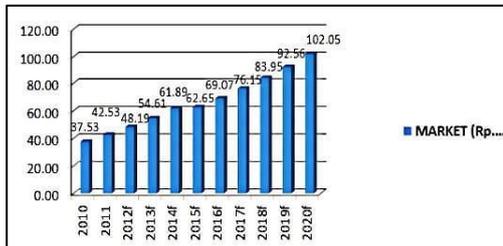
#### **a. Kebutuhan Bahan Baku Obat-obatan**

Berdasarkan pengkajian Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Indonesia yang termuat ke dalam kajian sektor kesehatan pada tahun 2019, meskipun 70% kebutuhan obat-obatan nasional hampir dapat dipenuhi melalui produksi dalam negeri, tetapi, bahan baku pembuatan obat-obatan dalam industri kefarmasian tersebut masih 95% berasal dari impor luar negeri, di

<sup>16</sup> Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020-2024*, hlm. 6.

mana nilai impornya mencapai 25% dari total nilai bisnis farmasi nasional.<sup>17</sup>

**Gambar: Pasar Farmasi Indonesia Tahun 2010 – Tahun 2020**



**Sumber: Bisnis Monitor 2011 dalam Media Litbangkes.<sup>18</sup>**

Berdasarkan data dari Dirjen Kefarmasian Alkes RI tahun 2018, pasar farmasi pada tahun 2020 mencapai pertumbuhan hingga Rp 100 triliun, di mana terdapat pertumbuhan 8% - 10% untuk pasar obat generik, 67% untuk pasar bermerk dagang, dan 23% - 25% untuk pasar obat originator. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Gabungan Pengusaha (GP) dalam investasi industri farmasi adalah kebijakan penetapan harga obat dalam JKN, yang tidak melibatkan industri farmasi, sehingga, menyebabkan harga obat generik tidak sesuai dengan biaya produksi, dan mengakibatkan produksi terhambat karena *margin profit* yang menipis.<sup>19</sup>

## b. Alat-alat Kesehatan

Indonesia merupakan negara yang memiliki luas wilayah lebih dari 1.9 juta m<sup>2</sup>, dengan jumlah pulau yang juga lebih dari 17 ribu pulau dan jumlah penduduk yang mencapai 270 juta jiwa pada tahun 2020. Ketersediaan alat-alat kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pelayanan kesehatan, yang di mana di Indonesia sendiri kebutuhan terhadap alat-alat kesehatan tersebut masih belum terdistribusi secara merata ke seluruh wilayah Indonesia. Ditilik berdasarkan luas wilayah dan pertambahan jumlah penduduk, maka, kebutuhan akan fasilitas alat-alat kesehatan juga akan meningkat.

Sementara, berdasarkan kajian sektor kesehatan BAPPENAS pada tahun 2019, sebesar 94% alat-alat kesehatan yang terdistribusi di Indonesia adalah produk impor, dan masih jauh dari kemandirian produksi alat-alat kesehatan nasional. Indonesia dinyatakan masih memproduksi alat-alat kesehatan dengan teknologi sederhana yang dapat diekspor. Selain itu, jumlah dan kemampuan uji klinis terhadap produk-produk alat kesehatan yang lengkap dan terakreditasi dengan baik masih terbatas sebagai kebutuhan di dunia kesehatan.<sup>20</sup>

## c. Vaksin

Vaksin didefinisikan sebagai suatu zat yang menjadi jenis produk Biologi yang berasal dari virus, bakteri, ataupun pencampuran antar kedua media tersebut yang sebelumnya harus dilemahkan terlebih dahulu. Vaksin menjadi produk kesehatan yang penting untuk diberikan kepada individu yang

<sup>17</sup> Kementerian PPN/BAPPENAS, *Op. Cit.*, hlm. 47.

<sup>18</sup> Raharni, dkk., "Kemandirian dan Ketersediaan Obat Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Kebijakan, Harga dan Produksi Obat," *Media Litbangkes*, vol. 28, no. 4, (Desember 2018): 225.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 222.

<sup>20</sup> Kementerian PPN/BAPPENAS, *Op. Cit.*, hlm. 67.

sehat, agar merangsang terbentuknya kekebalan tubuh yang dapat mencegah dari infeksi penyakit tertentu, tergantung dari jenis vaksin yang diberikan.<sup>21</sup>

Vaksin menjadi salah satu dari program penyelenggaraan kebijakan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) setelah obat-obatan dan alat kesehatan. Pemenuhan kebutuhan vaksin yang terjangkau, merata dan berkualitas menjadi salah satu kepentingan Indonesia dalam bidang keamanan kesehatan. Ketersediaan vaksin, obat-obatan dan alat kesehatan di Indonesia mengalami peningkatan secara signifikan, yaitu mencapai persentase 85,99% di tahun 2017 dari tahun sebelumnya yang sebesar 75,50%.<sup>22</sup>

### **Rencana Aksi dan Program Pemerintah Indonesia di Bidang Kesehatan**

Indonesia sebelumnya telah memiliki Rencana Aksi Kegiatan (RAK) di bidang kesehatan periode 2015-2019 yang menjadi sasaran pencapaian kinerja pemerintah, seperti: meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas fasilitas alat-alat kesehatan, dan memanfaatkan peluang investasi luar negeri untuk kepentingan transfer ilmu dan teknologi dalam upaya memenuhi sarana dan prasarana pengembangan produk alkes domestik.

---

<sup>21</sup> "Vaksin untuk Pencegahan, Serum untuk Pengobatan", Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016, diakses 25 Januari 2022, <https://www.kemkes.go.id/article/view/16072800004/vaksin-untuk-pencegahan-serum-untuk-pengobatan.html>.

<sup>22</sup> Kementerian PPN/BAPPENAS, *Op. Cit.*, hlm. 6.

Pada periode RAK periode 2020-2024, Indonesia memiliki strategi-strategi, seperti: memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia, dan memberdayakan masyarakat dan mengarusutamakan pembangunan kesehatan.<sup>23</sup>

Pada masa Pandemi Covid-19, Indonesia mengeluarkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No, 23 Tahun 2020, di mana kesehatan menjadi salah satu sektor utama program ini. Anggaran yang dialokasikan pada program PEN sektor kesehatan mencapai Rp 99,5 triliun untuk dibelanjakan ke dalam kebutuhan yang sangat esensial.<sup>24</sup>

### **Urgensi Indonesia Meningkatkan Keamanan Kesehatan**

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang mencapai 270 juta jiwa, yang mana ini merupakan jumlah penduduk terbesar di kawasan Asia Tenggara dan terbesar ke-4 di dunia. Fakta ini membuat Indonesia mempunyai ukuran pasar farmasi yang sangat besar. Bahkan, di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki pangsa pasar farmasi sebesar 27,8% dari total pangsa pasar ASEAN atau sebesar USD 5,93 miliar pada 2014.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 6.

<sup>24</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Merekam Pandemi Covid-19 dan Memahami Kerja Keras Pengawal APBN*, (Jakarta:Kementerian Keuangan Indonesia, 2021), hlm. 87.

<sup>25</sup> Kementerian PPN/BAPPENAS, *Op. Cit.*, hlm. 2.

Tren total *market share* farmasi di Indonesia mencapai Rp. 88,36 triliun pada tahun 2019, yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan permintaan dan konsumsi atas obat-obatan, alat kesehatan dan vaksin. Hal ini didorong oleh faktor kesadaran masyarakat yang terus meningkat akan pentingnya kebutuhan obat-obatan untuk kesehatan dan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat kelas menengah yang juga mendorong besarnya daya beli terhadap konsumsi obat-obatan atau suplemen kesehatan.<sup>26</sup>

### **Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Kerja Sama Kesehatan dengan Tiongkok**

Secara teoritis, jika dikaji melalui karakter kepemimpinan Joko Widodo sebagai kepala negara dalam merumuskan kebijakan luar negeri, maka Indonesia cenderung memiliki kebijakan luar negeri yang bersifat *inward-looking*. Kebijakan luar negeri Indonesia yang bersifat *inward-looking* ini dinilai sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas-aktif Indonesia, sebagaimana prinsip ini ditujukan untuk mewujudkan cita-cita nasional, seperti yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan berpartisipasi dalam perdamaian, serta ketertiban dunia.<sup>27</sup>

Pada masa kepemimpinan Joko Widodo, Indonesia memiliki tujuan

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Mangadar Situmorang, "Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK", *Parahyangan Center for International Studies*, (2015): 69

kebijakan luar negeri yang berupa, pemusatan identitas sebagai negara kepulauan dalam melaksanakan diplomasi dan membangun kerja sama internasional, diplomasi *middle power* menjadi instrumen *soft power* meningkatkan peran global dan memberikan Indonesia kekuatan regional dan global secara selektif dengan mengutamakan permasalahan yang terhubung langsung dengan kepentingan negara, memperbesar lingkup keterlibatan regional dalam Indo-Pasifik, dan melibatkan peran dan aspirasi rakyat dalam perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri negara.

Pada fokus keamanan kesehatan nasional, Indonesia telah memiliki kebijakan umum dan kebijakan khusus tersendiri yang mengatur tentang kesehatan, seperti berikut:

1. Kebijakan umum, seperti: Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.<sup>28</sup>
2. Kebijakan khusus, berupa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional.<sup>29</sup> Terdapat berbagai Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang program atau permasalahan kesehatan di Indonesia, seperti:<sup>30</sup>
  - a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23

<sup>28</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

<sup>29</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional.

<sup>30</sup> "PERMENKES", Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), diakses 29 Mei 2022, <https://persi.or.id/regulasi-persi/permenkes/>.

- Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional.
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, dan berbagai peraturan Menteri Kesehatan lainnya.

Tiongkok merupakan negara dari Benua Asia yang menjadi salah satu negara yang memiliki pengaruh dan kekuatan yang besar di dunia. Bahkan saat ini, Tiongkok terlibat persaingan kekuatan besar dengan Amerika Serikat. Melalui politik luar negerinya, Indonesia berusaha untuk mempertahankan keseimbangan dan ketidakberpihakannya terhadap kedua negara yang memiliki pengaruh dan kekuatan besar di dunia tersebut. Meskipun Tiongkok telah lama menjadi mitra kerja sama yang menjanjikan dan menguntungkan, Indonesia tetap menyadari bahwa posisi Geografis dan SDA-nya yang kaya membuat negara-negara berkekuatan besar, seperti Tiongkok tertarik untuk bermitra dengan Indonesia. Terlebih, negara-negara tersebut berusaha untuk memperebutkan pengaruh di kawasan Asia Tenggara.<sup>31</sup>

Pengaruh Tiongkok yang meningkat di kawasan Asia Tenggara dilihat Indonesia sebagai sesuatu yang sudah semestinya diterima dan itu tidak dapat dihindarkan. Dapat dikatakan bahwa melakukan kerja

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

sama dalam berbagai bidang, terutama pada bidang keamanan kesehatan merupakan pilihan dan tindakan yang wajar.<sup>32</sup>

### **Realisasi Kerja Sama Indonesia dan Tiongkok dalam Bidang Kesehatan**

Terdapat realisasi kegiatan yang disepakati kedua negara sebagai bentuk tindak lanjut terhadap MoU kerja sama dalam bidang kesehatan pada tanggal 28 November 2017 lalu, seperti:

1. Terlaksananya kerja sama, seperti penelitian bersama kedua negara terkait transplantasi organ, terjalannya kerja sama antara rumah sakit kedua negara, seperti Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dengan *Asian Pediatric Interventional Pulmonology Association*, dan terwujudnya kerja sama pembangunan sistem pelayanan tradisional yang terintegrasi dengan sistem kesehatan di Indonesia, terutama dalam program pencegahan penyakit.<sup>33</sup>
2. Berlangsungnya kunjungan Indonesia ke *National Medical Product Administration* (NMPA), Rumah Sakit Beijing Shijitan dan Universitas Peking, Tiongkok, pada tahun 2019, yang diwakili oleh Staf Khusus Menteri Bidang

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> "Indonesia Jajaki Kerjasama Uji Klinis Alat Kesehatan dengan China", Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, diakses 24 November, 2021, <https://www.kemkes.go.id/article/print/19022100001/indonesia-jajaki-kerjasama-uji-klinis-alat-kesehatan-dengan-china.html>.

Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Prof. Dr. Akmal Taher, SpU(K), dan Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, drg. Arianti Anaya, MKM. Kunjungan sekaligus pertemuan ini dilakukan Indonesia dalam rangka pembangunan sistem kesehatan nasional untuk uji klinis alat kesehatan.<sup>34</sup>

3. Kedua negara turut menyelenggarakan forum yang disebut *China Business Forum 2021*, yang bertemakan *New Road to Business Acceleration in Digitalization, Health and Green Economy in Indonesia*, atas inisiasi KBRI Beijing dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Beijing, Kementerian Luar Negeri RI, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika dan Indonesia, serta *Chamber of Commerce in China* (INACHAM).<sup>35</sup>
4. Pada masa pandemi Covid-19, kedua negara di mana Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir, menjadi delegasi Indonesia untuk bertemu Wang Yi. Pertemuan tersebut menghasilkan salah satu kesepakatan penting dalam

proyek strategis kedua negara, yaitu, kerja sama Indonesia sebagai hubungan regional untuk produksi vaksin, dan pembangunan pabrik bahan baku obat, serta penguatan *Unit Research and Development* atas obat herbal.<sup>36</sup>

### **Capaian Indonesia dalam Meningkatkan Keamanan di Bidang Kesehatan melalui Kerja Sama dengan Tiongkok**

Berdasarkan laporan dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 2021, Tiongkok sebagai rekan kerja sama bilateral Indonesia dalam bidang kesehatan merupakan negara yang paling banyak mengekspor bahan baku obat-obatan, termasuk alat-alat kesehatan dan vaksin ke Indonesia, yaitu sebanyak 60%.<sup>37</sup> Berikut disajikan tiga kebutuhan dasar yang berhasil dipenuhi oleh Indonesia melalui kerja sama di bidang kesehatan dengan Tiongkok:

#### 1. Pemenuhan Bahan Baku Obat dan Obat-obatan

Terdapat bahan baku obat utama dari Tiongkok yang diekspor ke Indonesia, seperti kebutuhan terhadap berbagai vitamin, amoksisilin, parasetamol, ampisilin, penisilin, dan lain sebagainya. Tiongkok memang merupakan

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> “Pebisnis Indonesia dan China Bahas Kerja Sama Digital, Industri Kesehatan dan Ekonomi Hijau di Beijing”, Amelia Fitriani, Republik Merdeka, 2021, diakses 30 Mei 2022, <https://dunia.rmol.id/read/2021/10/20/508790/pebisnis-indonesia-dan-china-bahas-kerja-sama-digital-industri-kesehatan-dan-ekonomi-hijau-di-beijing>

<sup>36</sup> “Kunjungan ke China, Ini Oleh-oleh Luhut”, Kompas, 2021, diakses 30 Mei 2022, <https://money.kompas.com/read/2021/06/07/202358826/kunjungan-ke-china-ini-oleh-oleh-luhut-untuk-indonesia?page=all>.

<sup>37</sup> *Ibid*.

negara terbesar yang memproduksi bahan baku obat untuk dunia.<sup>38</sup>

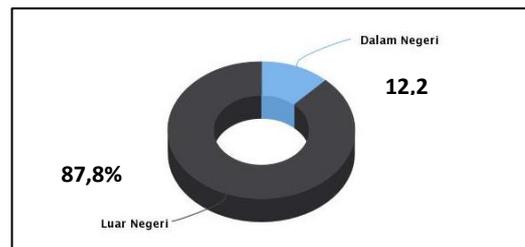
Berdasarkan laporan dari Kementerian Kesehatan RI, tercapai pemenuhan atas bahan baku obat yang mendorong tercapainya peningkatan persentase ketersediaan obat di Puskesmas Indonesia sebesar 89,30% pada tahun 2017, meningkat menjadi 92,47% pada 2018, dan 94,22% pada 2019.<sup>39</sup> Pada tahun 2020, berdasarkan data dari Kementerian kesehatan RI, Indonesia berhasil mencatat pencapaian peningkatan ketersediaan obat sebesar 108,77% sebagai pemenuhan di seluruh Puskemas Indonesia, dengan dominasi ketersediaan kebutuhan berasal dari Tiongkok.<sup>40</sup>

## 2. Pemenuhan Alat-alat Kesehatan

Hingga pada tahun 2021, Indonesia memiliki persentase jumlah produk impor alat kesehatan

yang memiliki izin edar sebesar 87,8%, di mana persentase impor alat kesehatan ini didominasi oleh alat kesehatan yang berasal dari Tiongkok, seperti pada gambar berikut:

**Gambar: Presentase dan Jumlah Produk Dalam dan Luar Negeri Berdasarkan Izin Edar Alat Kesehatan**



**Sumber: Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia<sup>41</sup>**

Indonesia pada tahun 2020 memiliki target realisasi persentase alat kesehatan Indonesia memenuhi syarat sebesar 92,70%, atau berhasil mencapai persentase kebutuhan atas alat-alat kesehatan sebesar 107,76%.<sup>42</sup>

Terdapat kebutuhan alat-alat kesehatan yang penting di Indonesia, dan berhasil dipenuhi melalui kerja sama di bidang kesehatan dengan Tiongkok, seperti: peralatan *dental operative unit and accessories*; elektromedik non-radiasi, peralatan

<sup>38</sup> Pusat Pengkajian Industri Proses dan Energi: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, *Outlook Teknologi Kesehatan 2020: Inisiatif Penguatan Rantai Pasok Bahan Baku Obat*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Industri Proses dan Energi, 2020), hlm. iv-42.

<sup>39</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Rencana Aksi Program Tahun 2020-2004*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020), hlm. 11.

<sup>40</sup> “Peningkatan Akses, Kemandirian dan Mutu Kefarmasian dan Alat Kesehatan Guna Mencapai Tujuan Peningkatan Sumber Daya Kesehatan”, Setditjen Farmalkes, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022, diakses 21 Februari 2022, <https://farmalkes.kemkes.go.id/2021/04/pe-ningkatan-akses-kemandirian-dan-mutu-kefarmasian-dan-alat-kesehatan-guna-mencapai-tujuan-peningkatan-sumber-daya-kesehatan/>

<sup>41</sup> Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021, diakses 21 Februari 2022, <http://infoalkes.kemkes.go.id/>

<sup>42</sup> “Peningkatan Akses, Kemandirian dan Mutu Kefarmasian dan Alat Kesehatan Guna Mencapai Tujuan Peningkatan Sumber Daya Kesehatan”, *Op. Cit.*

kardiologi diagnostik *Arrhythmia detector and alarm including ST-segment measurement and alarm*: elektromedik non-radiasi, non-elektromedik steril, berbagai jenis sistem tes kimia klinik (invitro diagnostik), peralatan laboratorium klinik *colorimeter, photometer or spectrophotometer for clinical use*: invitro diagnostik, antigen *rapid test*: invitro diagnostik, dan lain sebagainya.<sup>43</sup>

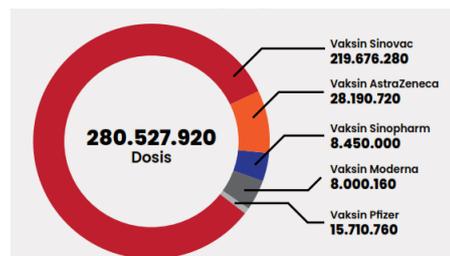
### 3. Pemenuhan Vaksin

Pada akhir tahun 2020, Indonesia mengalami peningkatan impor vaksin dari Tiongkok hingga 3000%, di mana pada bulan November 2020 hanya sebanyak 1,1 ton (US\$ 720 ribu), dan pada Desember 2020 mengalami peningkatan sampai 2 ton (US\$ 22,73 juta). Adapun jenis vaksin yang diimpor ini antara lain adalah vaksin untuk pengobatan manusia antara lain seperti vaksin Tetanus, Meningitis, Polio, dan juga vaksin COVID-19.<sup>44</sup>

Melalui diplomasi vaksin Indonesia ke Tiongkok untuk memenuhi dan mengamankan kebutuhan vaksin terkait penuntasan penyebaran penyakit COVID-19 secara merata di seluruh tanah air, sampai per tanggal 4 Oktober 2021,

Indonesia berhasil mengamankan total pasokan vaksin *Sinovac* sebesar 219.676.280, dan vaksin *Sinopharm* sebanyak 8.450.000 dosis dari Tiongkok.<sup>45</sup>

**Gambar 4.2: Total Vaksin Diperoleh per 4 Oktober 2021**



**Sumber: Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN)<sup>46</sup>**

Pada tahun 2021, Indonesia memiliki target sasaran vaksinasi nasional sebesar 208.265.720 orang, dengan total jumlah dosis vaksin yang diterima, Indonesia berhasil mencatat 204.913.735 suntikan dosis di seluruh tanah air. Ini berarti negara berhasil mencapai lebih dari setengah target vaksinasi nasional, atau sekitar 40% untuk kategori vaksinasi lengkap, dan 60% untuk kategori dosis pertama. Ini juga berarti Indonesia berhasil berkontribusi dalam pemenuhan target yang ditetapkan oleh WHO, yakni pemenuhan vaksinasi minimal satu dosis, seminimalnya 40% bagi warga di seluruh dunia. Capaian ini membawa Indonesia masuk menjadi lima negara dengan jumlah suntikan tertinggi di dunia, bersama dengan

<sup>43</sup> “Info Alkes dan PKRT”, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022, diakses 22 Februari 2022, <http://infoalkes.kemkes.go.id/>.

<sup>44</sup> “Impor Vaksin dari China Meroket 3000% di Desember 2020”, Lidya Julita Sembiring, CNBC Indonesia, 2021, diakses 17 Februari 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211115161632-4-216374/impor-vaksin-dari-china-meroket-3000-di-desember-2020>.

<sup>45</sup> Kementerian Luar Negeri Indonesia, *Capaian Kinerja 2021: Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh*, 2021, hlm. 17.

<sup>46</sup> KPC PEN dalam *ibid*.

India, Amerika Serikat, Brazil, dan Jepang.<sup>47</sup>

### **Hambatan Indonesia dalam Bekerja Sama di Bidang Kesehatan dengan Tiongkok**

Kerja sama di bidang kesehatan yang dilakukan oleh Indonesia dengan Tiongkok tentu memiliki hambatan yang dapat mempengaruhi hubungan kerja sama kedua negara.

Pertama, ketidakstabilan nilai tukar. Sebagai bagian dari kebijakan pemenuhan kapasitas kesehatan di Indonesia melalui kerja sama bilateral dengan Tiongkok, kedua pihak tentu akan memiliki kendala dalam nilai tukar, terutama terhadap nilai tukar Rupiah. Cepatnya perkembangan berbagai jenis obat dan turunannya turut mempengaruhi fluktuasi harga obat, sehingga, banyak investor yang berpikir dua kali untuk terjun ke dalam bisnis farmasi, karena membutuhkan aktivitas riset dan pengembangan yang besar. Pembuatan obat juga membutuhkan kontribusi bahan baku sebesar 25%-30% dari total biaya produksi obat, yang membuat intervensi dalam komponen akan mempengaruhi harga obat.<sup>48</sup>

Kedua, adanya kekhawatiran dari lingkup eksternal atas pengaruh Tiongkok terhadap Indonesia. Kedekatan hubungan bilateral antara

Indonesia dan Tiongkok, terutama jika dikaji dari sisi kerja sama ekonomi kedua negara, telah menjadi perhatian global yang tentu dapat memunculkan beberapa konsekuensi. Salah satu konsekuensi adalah kerja sama erat yang dijalin kedua negara dapat memicu ketidaknyamanan dari negara besar seperti Amerika Serikat dan sekutunya.<sup>49</sup> Ini dapat menimbulkan pertanyaan atas sikap/prinsip politik luar negeri bebas-aktif Indonesia yang sejak dahulu telah digaungkan oleh negara.

Ketiga, adanya stigma dari lingkup domestik terhadap Tiongkok. Indonesia memiliki pengalaman sejarah pemberontakan G 30 S/PKI yang juga diduga melibatkan Tiongkok dalam kudeta tersebut. Kejadian ini masih kuat tertanam dalam berbagai kalangan, seperti politisi dan aktivis masyarakat, sehingga, terjadi dorongan atau tuntutan untuk mendesak agar negara harus mengurangi ketergantungan kepentingan dari Tiongkok.<sup>50</sup>

### **KESIMPULAN**

Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri bebas-aktif, dengan kebijakan luar negeri yang bersifat *Inward-looking* di masa pemerintahan Joko Widodo. Prinsip dan sifat kebijakan luar negeri ini mendorong Indonesia memiliki opsi untuk bekerja sama dengan negara lain untuk mencapai kepentingan nasional, dan menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa Indonesia

---

<sup>47</sup> “Penuhi Target WHO, Cakupan Vaksinasi di Indonesia Lampau 200 Juta Dosis”, Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021, diakses 17 Februari 2022, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/37962/penuhi-target-who-cakupan-vaksinasi-di-indonesia-lampau-200-juta-dosis/0/berita>

<sup>48</sup> Kementerian PPN/BAPPENAS, *Op. Cit.*, hlm. 10

---

<sup>49</sup> Muhammad Arif Musthofa, M. Faiqul Ikhsan dan Yunita Rizki, “Kerjasama Pengadaan Peralatan Penanganan Covid-19 antara Cina dan Indonesia”, *Jurnal National Conference Multidisciplinary*, vol. 1, no. 1, (2021): 262.

<sup>50</sup> *Ibid.*

merupakan negara berdaulat yang tidak memihak atau condong kepada negara-negara besar di dunia, seperti Amerika Serikat atau Tiongkok.

Pada tahun 2017, Indonesia dan Tiongkok memperjelas hubungan kerja sama di bidang kesehatan dengan menandatangani Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Kesehatan RI dan Komisi Kesehatan Nasional dan Keluarga Berencana RRT, di mana kerja sama ini kembali diperkuat dengan disepakatinya *Plant of Action* antara kedua negara pada tahun 2020. Indonesia menganggap bahwa Tiongkok merupakan mitra penting yang memiliki kesiapan dan kesigapan di bidang kesehatan, dan sesuai dengan salah satu program prioritas Indonesia, yaitu meningkatkan keamanan negara, termasuk pada keamanan non-tradisional, yaitu bidang kesehatan.

Laporan dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, pada tahun 2021 menyebutkan bahwa melalui kerja sama bilateral di bidang kesehatan dengan Tiongkok, Indonesia berhasil mencapai kebutuhan dasar di bidang kesehatan sebagai upaya untuk pengendalian dan pencegahan penyakit menular maupun tidak menular, pelayanan kesehatan primer, serta menjaminan kesehatan semesta rakyat, yakni: bahan baku pembuat obat-obatan, alat-alat kesehatan, dan vaksin yang mencapai total 60%. Kerja sama bilateral antara kedua di bidang kesehatan dilaksanakan, sebagai bentuk kebijakan pemerintah dalam menghindari terjadinya kekurangan kebutuhan dasar kesehatan di seluruh wilayah Indonesia, terutama apabila ditemukan peristiwa darurat kesehatan global, seperti Pandemi

Covid-19 yang tidak dapat diketahui kapan waktu terjadi, dan kapan waktu berakhirnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Musthofa, Muhammad Arif, M. Faiqul Ikhsan dan Yunita Rizki. "Kerjasama Pengadaan Peralatan Penanganan Covid-19 antara Cina dan Indonesia", *Jurnal National Conference Multidisciplinary*, vol. 1, no. 1, (2021): 255.
- Olivia, Yessi. "Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional". *Jurnal Transnasional*. Vol. 5, No. 1, (Juli 2013): 899.
- Raharni, dkk., "Kemandirian dan Ketersediaan Obat Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Kebijakan, Harga dan Produksi Obat," *Media Litbangkes*, vol. 28, no. 4, (Desember 2018): 225.

### Buku

- Bakry, Umar Suryadi. *Dasar-dasar Hubungan Internasional*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Rencana Aksi Program Tahun 2020-2004*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Merekam Pandemi Covid-19 dan Memahami Kerja Keras Pengawal APBN*, (Jakarta:Kementerian Keuangan Indonesia, 2021).
- Kementerian Luar Negeri Indonesia,

- Capaian Kinerja 2021:Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh*, (2021).
- Kementerian PPN/BAPPENAS. *Penyediaan Obat Vaksin dan Alat Kesehatan*, (Jakarta: Direktorat Kesehatan Gizi dan Masyarakat, 2019).
- Legatum Institute. *The Legatum Prosperity Index 2017*, (London: Legatum Institute, 2017).
- Pusat Pengkajian Industri Proses dan Energi: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. *Outlook Teknologi Kesehatan 2020: Inisiatif Penguatan Rantai Pasok Bahan Baku Obat*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Industri Proses dan Energi, 2020).
- Rosenau, James N. *The Study of Political Adaptation: Essays on The Analysis of World Politics*, (New York: Nichols Publishing, 1981).
- Laporan Resmi**
- Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020-2024*.
- Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021, diakses 21 Februari 2022, <http://infoalkes.kemkes.go.id/>
- Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Info Alkes dan PKRT”, 2022, diakses 22 Februari 2022, <http://infoalkes.kemkes.go.id/>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Indonesia Jajaki Kerjasama Uji Klinis Alat Kesehatan dengan China”, diakses 24 November, 2021, <https://www.kemkes.go.id/artic le/print/19022100001/indonesi a-jajaki-kerjasama-uji-klinis- alat-kesehatan-dengan- china.html>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Vaksin untuk Pencegahan, Serum untuk Pengobatan”, 2016, diakses 25 Januari 2022, <https://www.kemkes.go.id/artic le/view/16072800004/vaksin- untuk-pencegahan-serum- untuk-pengobatan.html>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Setditjen Farmalkes, “Peningkatan Akses, Kemandirian dan Mutu Kefarmasian dan Alat Kesehatan Guna Mencapai Tujuan Peningkatan Sumber Daya Kesehatan”, 2022, diakses 21 Februari 2022, <https://farmalkes.kemkes.go.id/ 2021/04/peningkatan-akses- kemandirian-dan-mutu- kefarmasian-dan-alat- kesehatan-guna-mencapai- tujuan-peningkatan-sumber- daya-kesehatan/>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “Penuhi Target WHO, Cakupan Vaksinasi di Indonesia Lampau 200 Juta Dosis”, 2021, diakses 17 Februari 2022, <https://www.kominfo.go.id/con tent/detail/37962/penuhi- target-who-cakupan-vaksinasi- di-indonesia-lampau-200-juta- dosis/0/berita>
- Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Komisi

Kesehatan Nasional dan Keluarga Berencana Republik Rakyat Tiongkok di Bidang Kerja Sama Kesehatan Tahun 2017-2024, Pasal I Tujuan, hlm. 2.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional.

Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), “PERMENKES”, diakses 29 Mei 2022, <https://persi.or.id/regulasi-persi/permenkes/>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

United Nations Trust Fund for Human Security, “Human Security In Theory And Practice: Application of the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security”, diakses 8 Oktober, 2021, <https://www.unocha.org/sites/dms/HSU/Publications%20and%20Products/Human%20Security%20Tools/Human%20Security%20in%20Theory%20and%20Practice%20English.pdf>

Worldmeter, “Indonesia Covid”, 2021, diakses 4 September, 2021, <https://www.worldometers.info/coronavirus/country/indonesia>

## Situs Web

Debora, Yantina, Tirto, “Indeks Kesehatan Indonesia Masih Sangat Rendah”, 2017, [diakses 5 September, 2021, https://tirto.id/indeks-kesehatan-indonesia-masih-sangat-rendah-cBRn](https://tirto.id/indeks-kesehatan-indonesia-masih-sangat-rendah-cBRn)

Fitriani, Amelia, Republik Merdeka, “Pebisnis Indonesia dan China Bahas Kerja Sama Digital, Industri Kesehatan dan Ekonomi Hijau di Beijing”, 2021, diakses 30 Mei 2022, <https://dunia.rmol.id/read/2021/10/20/508790/pebisnis-indonesia-dan-china-bahas-kerja-sama-digital-industri-kesehatan-dan-ekonomi-hijau-di-beijing>

Kompas, “Kunjungan ke China, Ini Oleh-oleh Luhut”, 2021, diakses 30 Mei 2022, <https://money.kompas.com/read/2021/06/07/202358826/kunjungan-ke-china-ini-oleh-oleh-luhut-untuk-indonesia?page=all>

Sembiring, Lidya Julita, CNBC Indonesia, “Impor Vaksin dari China Meroket 3000% di Desember 2020”, 2021, diakses 17 Februari 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210115161632-4-216374/impor-vaksin-dari-china-meroket-3000-di-desember-2020>